

ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS BENTUK-BENTUK PELANGGARAN PORNOGRAFI OLEH MEDIA CETAK DARI PERSPEKTIF UU NO.44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI (Studi di Wilayah Hukum Polresta Malang)

 Oleh: MUHAMMAD NUR (06400232)

Law

Dibuat: 2011-02-10 , dengan 6 file(s).

Keywords: pelanggaran pornografi, media ceta

ABSTRAKSI

Media cetak yang beredar di masyarakat ternyata banyak mengandung unsur sensualitas mengarah ke pornografi. Penulis disini tertarik untuk menganalisis kandungan pornografi pada berbagai media cetak tersebut, juga bagaimana upaya penanganan Kepolisian terhadap eksistensi media cetak ini.

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis, dimana penulis menganalisis media cetak yang terbit di wilayah hukum Polresta Malang. Penelitian dilaksanakan di Polresta Malang dengan sumber data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk pengolahan data, penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian, Berdasarkan hasil analisis penulis pada media yaitu Maxim Edisi Juli 2010, FHM Edisi Juli 2010, Tabloid Kisah Nyata Edisi 323 / 01 s/d 10 Agustus 2010, Memo Arema Kamis 15 Juli 2010, dan Memo Arema Jumat 16 Juli 2010 terdapat konten pornografi yang sesuai dengan yang disebutkan pada Pasal 1 UU No.44 tahun 2008 tentang Pornografi. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 4 UU No.44 tahun 2008 tentang Pornografi. Upaya Pihak Kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran pornografi oleh media cetak di wilayah hukum Polresta Malang antara lain adalah sebagai berikut: (1) Polresta Malang menerima laporan tindak pidana pelanggaran pornografi oleh media cetak; (2) Mengumpulkan informasi berkaitan dengan tindak pelanggaran pornografi; (3) Meminta Legitimasi berupa surat penyitaan materi pornografi media cetak dari Ketua Pengadilan Negeri; (4) Mempertimbangkan langkah lanjutan seperti pelarangan untuk distribusi media cetak atau larangan penerbitan; Namun demikian, sampai saat ini prosedur tersebut masih belum dilaksanakan oleh Polresta Malang. Hambatan Pihak Kepolisian dalam mencegah pelanggaran pornografi oleh media cetak di wilayah hukum Malang adalah: (1) Tidak ada laporan masyarakat berkaitan dengan pelanggaran pornografi oleh media cetak; (2) Kesulitan dalam menganalisis perbedaan antara erotika dan pornografi yang terkandung dalam suatu media cetak; Sedang solusi untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain adalah: (1) Bertindak proaktif dalam upaya mendapatkan media cetak yang melanggar ketentuan pornografi; (2) Mendatangkan tenaga ahli di bidang hukum untuk menganalisis materi media cetak.

ABSTRACT

The printed media that circulate in the community turned out to contain many elements of sensuality leads to pornography. Authors interested here to analyze the content of pornography on various printed media, as well as how the police effort to handle the existence of this printed media.

In this research, the author uses legal-sociological approach, in which the author analyzes the printed media are published in the jurisdiction of local Police of Malang. The experiment was conducted in Malang Police with the data source as interviews, observation, and documentation. For data processing, the authors used a qualitative descriptive analysis.

From the research, based on the author analyzes the media in July 2010 edition of Maxim, FHM July 2010 Edition, The True Story Tabloid Edition 323 / 01 s / d August 10, 2010, Memo Arema Thursday, July 15, 2010, and Memo Arema Friday July 16 2010 contained pornographic content in accordance with that mentioned in Article 1 of Law no. 44 of 2008 on Pornography. This is contrary to Article 4 of Law. 44 of 2008 on Pornography. Police efforts to cope with pornography violations by the printed media in the jurisdiction of local Police, among others, are as follows: (1) Police received reports of Malang pornography criminal violations by the printed media, (2) Gather information relating to criminal violations of pornography, (3) Legitimacy in the form of a letter requesting confiscation of pornographic materials from the chairman of the District Court, (4) Consider further steps such violations to the printed media distribution or publishing ban, however, until now the procedure has not yet been carried out by Police in Malang. Police barriers in preventing violations of pornography by the printed media in Malang jurisdictions are: (1) No public reports relating to violations of pornography by the printed media, (2) The difficulty in analyzing the difference between erotica and pornography that is contained in a printed media. Being a solution to overcome these obstacles include: (1) To act proactively in order to obtain a printed media that violates the provisions of pornography, (2) Bring in experts in the field of law to analyze the content of printed media.

Key words: abuse, pornography, printed media